

# **DARI OTORITARIANISME KE DEMOKRASI: BAGAIMANA MENDORONG NEGARA MENUJU KESTABILAN DAN KETERBUKAAN?**

## ***FROM AUTHORITARIANISM TO DEMOCRACY : HOW TO ENDORSE STATE INTO STABILITY AND OPENNES?***

**Mohamad Rosyidin**

Mahasiswa Pascasarjana (S2) Ilmu Hubungan Internasional Fisipol  
Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta  
*E-mail: mohamad.rosyidin@gmail.com*

Diterima: 26 Januari 2013; direvisi: 15 April 2013; disetujui: 12 Juni 2013

Judul buku : The J Curve: Strategi Memahami Mengapa Bangsa-bangsa Berjaya dan Jatuh  
Pengarang : Ian Bremmer  
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama  
Cetakan : I (2013)  
Tebal : 409 + xii halaman

### ***Abstract***

*Democratization has become salient phenomena in world politics since post-Cold War. It has been argued that democratization not only ensure civil rights but also bolster international peace and security. The problem is many countries remain adopt authoritarianism which violate civil rights even if there is no political disruption. Nevertheless, the ideal political system is both stable and open system. This article highlights the 'J curve' theory that offers explanation on political dynamic as well as provides policy recommendation for great powers to encourage democratization in authoritarian countries. The strategy to encourage political change towards democracy is strengthening political institutionalization. Political institutionalization matters in order to avoid instability trap as democratization proceeds. This article argues that the 'J curve' theory is very supportive to US foreign policy agenda. The theory suggests that US need to stress on political institutionalization rather than military intervention to end authoritarianism. US engagement in the process of democratization in Indonesia reflects the application of the 'J curve' theory.*

**Keywords:** *the 'J curve' theory, authoritarianism, democratization, political institutionalization*

### **Abstrak**

Demokratisasi menjadi fenomena penting dalam politik dunia sejak berakhirnya Perang Dingin. Pendapat yang berkembang mengatakan bahwa demokratisasi tidak hanya menjamin hak-hak sipil, tetapi juga menunjang keamanan dan perdamaian internasional. Masalahnya, banyak negara di dunia yang masih mengadopsi sistem otoritarianisme yang tidak menjamin hak-hak sipil meskipun politik di negara-negara tersebut relatif tidak ada gejolak. Walaupun demikian, sistem politik yang ideal adalah sistem politik yang stabil sekaligus terbuka. Artikel ini meyoroti teori 'Kurva J' yang menawarkan penjelasan tentang dinamika politik suatu negara dan menyediakan rekomendasi kebijakan kepada negara besar untuk mendorong demokratisasi di negara otoriter. Strategi mendorong perubahan politik menuju demokrasi adalah dengan memperkuat kelembagaan politik. Kelembagaan politik sangat penting agar terhindar dari jebakan ketidakstabilan selama menempuh proses demokratisasi. Artikel ini berpendapat bahwa teori 'Kurva J' sangat mendukung agenda politik luar negeri Amerika. Teori 'Kurva J' menyarankan supaya

Amerika lebih mengedepankan cara-cara pelembagaan politik ketimbang intervensi militer dalam mengakhiri otoritarianisme. Keterlibatan Amerika dalam proses demokratisasi di Indonesia mencerminkan penerapan teori 'Kurva J'.

**Kata kunci:** teori 'Kurva J', otoritarianisme, demokratisasi, pelembagaan politik

## Pendahuluan

Fenomena *Arab Spring* di permulaan tahun 2011 lalu membuktikan kebenaran tesis Francis Fukuyama bahwa demokrasi adalah ideologi universal umat manusia yang bersifat final. Kita telah menyaksikan negara-negara sedang berderap menuju demokrasi. Meskipun perjalanan menuju demokrasi tidak mudah, banyak negara percaya bahwa demokrasi akan menjamin keterpenuhan hak-hak sipil warga negara sekaligus memberi jalan kepada kemakmuran.

Alur berpikir itulah yang mendasari penulisan buku ini. Dengan bangunan argumen yang cerdas dan masuk akal, Ian Bremmer mengemukakan teori tentang jalur yang dilalui suatu negara untuk mengakhiri otoritarianisme. Teori 'Kurva J' menyediakan kerangka analisis yang memadai untuk memahami bagaimana negara-negara runtuh atau bertahan dalam proses menuju pemerintahan terbuka. Disebut 'Kurva J' karena teori itu digambarkan dalam bentuk grafik dengan sumbu vertikal yang mengukur kestabilan dan sumbu horizontal yang mengukur keterbukaan politik dan ekonomi terhadap dunia luar (hlm. 5). Jika kita ingin mengukur tingkat kestabilan dan keterbukaan suatu negara maka akan terbentuk sebuah titik. Titik-titik data ini ketika dirangkai menjadi satu akan membentuk sebuah kurva yang mirip huruf J. Semakin ke kiri negara yang kita ukur menempati kurva tersebut maka semakin tertutup negara itu, dan sebaliknya. Semakin tinggi letak suatu negara yang kita ukur dalam kurva tersebut maka semakin stabil negara itu, dan sebaliknya. Dengan pola seperti itu, teori 'Kurva J' juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara maju mengenai cara paling efektif untuk membantu negara-negara otoriter keluar dari belenggu kediktatoran.

Dalam sistem pemerintahan negara-negara di dunia, ada dua jenis karakter sebuah rezim, yaitu negara yang stabil karena tertutup dan negara yang stabil karena terbuka. Idealnya, negara yang stabil karena terbuka lebih baik dibandingkan negara yang stabil karena tertutup.

Oleh sebab itu, pertanyaan besar yang perlu dicari jawabannya adalah bagaimana cara mengubah negara yang stabil karena tertutup menjadi negara yang stabil karena terbuka. Untuk menjawab pertanyaan ini, Bremmer terinspirasi dari teori ekonomi. Teori 'Kurva J' sebenarnya diadaptasi dari teori perdagangan internasional, khususnya kurva J yang mengukur hubungan antara defisit perdagangan suatu negara dan nilai tukar mata uangnya (hlm. 5).

Secara garis besar, buku ini menyoroti dua faktor penentu kualitas sebuah pemerintahan, yakni keterbukaan dan kestabilan. Keterbukaan mengukur sejauh mana sebuah negara selaras dengan arus-arus globalisasi yang saling-silang (hlm. 6) serta seberapa jauh negara tersebut menjamin kebebasan warga negaranya dalam berekspresi dan memperoleh informasi. Sementara itu, kestabilan merujuk pada kemampuan negara bertahan dari guncangan dan kemampuannya untuk tidak membuat guncangan-guncangan (hlm. 7). Dari kategorisasi itu, Bremmer memberikan contoh negara-negara, seperti Korea Utara, Kuba, dan Irak sebagai negara yang berada pada sisi paling kiri dari Kurva J, yakni negara stabil tetapi tertutup. Sebaliknya, negara-negara yang dikategorikan sebagai negara 'agak terbuka', tetapi berpotensi menjadi tidak stabil adalah Iran, Arab Saudi, dan Rusia. Afrika Selatan dan Yugoslavia adalah contoh negara yang berada di paling bawah dari Kurva J. Negara-negara yang berada di sisi paling kanan Kurva J atau masuk dalam kategori negara stabil dan terbuka, contohnya adalah Turki, Israel, dan India. Untuk Cina, Bremmer menempatkannya di sisi kiri Kurva J dengan alasan Cina masih relatif tertutup sekalipun ekonominya terbuka, namun stabil.

Buku ini berangkat dari tesis bahwa sebuah negara yang stabil karena ketertutupannya harus melalui sebuah babak ketidakstabilan yang berbahaya atau kritis sewaktu negara itu membuka diri terhadap dunia luar (hlm. 6). Jadi, proses menuju kestabilan dan keterbukaan membutuhkan 'pengorbanan' berupa ketidakstabilan.

Fase krisis ini perlahan-lahan akan dilalui seiring dengan proses penguatan kelembagaan domestik negara bersangkutan hingga benar-benar mencapai tahapan yang matang.

Teori 'Kurva J' mengimplikasikan bahwa jauh lebih cepat dan mudah menutup sebuah negara daripada membukanya (hlm. 18). Untuk mengubah rezim menjadi otoriter, hanya diperlukan kekuasaan tak terbatas yang mengendalikan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Lebih efisien memulihkan ketertiban dengan mengumumkan undang-undang darurat perang daripada undang-undang kebebasan pers. Sementara itu, untuk menuju sisi kanan Kurva J, proses yang dilalui cukup panjang dan melelahkan. Proses inilah yang biasanya dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang. Mengubah sistem dari kediktatoran militer ke parlementer adalah perkara mudah. Akan tetapi, mengisinya dengan tokoh-tokoh yang berdedikasi dan berintegritas tidak semudah membalik telapak tangan. Korea Selatan dan Indonesia menjadi contoh betapa demokratisasi adalah sebuah proses yang menguras biaya, tenaga, dan pikiran.

### Strategi 'Kuda Troya'

Mendambakan kestabilan tidak mensyaratkan demokrasi. Dalam sistem otoriter yang tertutup sekalipun, kestabilan tetap ada bahkan mungkin dengan derajat yang lebih stabil dibandingkan sistem demokratis. Kendali terpusat berfungsi seperti peredam kejut yang menyerap guncangan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, dalam sistem demokratis belum tentu terdapat kestabilan karena begitu kran kebebasan dibuka berbagai gejolak muncul secara tiba-tiba. Hanya saja, kestabilan pada rezim otoriter sangat tergantung pada pribadi seorang pemimpin. Selama sang pemimpin masih hidup, kestabilan bisa dipertahankan. Akan tetapi, jika suksesi politik tidak mampu mempertahankan 'kultus individu', bisa dipastikan rezim tersebut akan jatuh pada lereng paling bawah dari Kurva J. Dengan kata lain, akan mengalami fase ketidakstabilan yang parah.

Jika memang kestabilan tidak dipengaruhi oleh sistem politik, mengapa sistem otoritarianisme tidak didukung? Dengan kata lain, jika negara otoriter saja bisa stabil dan negara yang sedang menuju demokrasi justru tidak stabil,

mengapa tidak memilih sistem otoriter saja untuk menjamin kestabilan? Ini adalah pertanyaan cerdas dan menarik. Bremmer mengajukan alasan bahwa kediktatoran mustahil bisa bertahan lama (hlm. 28). Otoritarianisme bertentangan dengan hasrat alami manusia untuk bebas. Masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang represi pemerintah ibarat bom waktu yang suatu saat akan meledak. Begitu momentum itu tiba, hasrat terpendam tadi meledak tanpa kendali. Jika itu terjadi, negara bekas kediktatoran itu akan jatuh di kurva paling bawah dan menjadi lahan subur bagi munculnya sumber-sumber ancaman, seperti terorisme dan senjata pemusnah massal. Dalam fase transisi menuju demokrasi, negara menjadi lebih agresif dan tak jarang memicu perang dengan negara lain.<sup>1</sup>

Berbeda dengan kestabilan yang terdapat, baik pada rezim otoriter maupun demokratis, keterbukaan hanya mungkin dijamin oleh pemerintahan demokratis. Sistem demokrasi menjamin kebebasan berekspresi warganya dan mengakses informasi dari mana saja. Memang, keterbukaan tidak bisa menjamin kestabilan. Akan tetapi, kestabilan yang didukung dengan keterbukaan lebih baik dan tahan lama karena dua alasan. Pertama, negara yang stabil dan terbuka akan terhindar dari guncangan yang bisa menyeretnya ke titik terendah dari Kurva J. Kedua, negara yang stabil dan terbuka relatif lebih ramah dalam hal kebijakan luar negerinya sehingga akan berkontribusi terhadap perdamaian internasional. Hal ini jelas berbeda dengan negara otoriter-tertutup yang cenderung bersikap agresif untuk menarik perhatian dunia internasional.

Sebagai buku yang dimaksudkan untuk para pembuat kebijakan luar negeri Amerika, Bremmer mengajukan rekomendasi tentang kebijakan apa yang harus dilakukan negaranya untuk mendorong negara otoriter menuju demokrasi. Alih-alih menganjurkan intervensi militer yang hanya akan memicu permusuhan, ia menganjurkan agar negara-negara maju menciptakan kondisi-kondisi yang paling disukai rezim tertutup agar dengan aman melewati babak kurang stabil pada Kurva J di samping meminimalkan risiko sewaktu transisi menuju modernisasi

<sup>1</sup> Edward Mansfield dan Jack Snyder, "Democratization and The Danger of War," *International Security*, Vol. 20, No. 1, Summer, 1995, hlm. 5.

mereka dimulai (hlm. 30). Bagi negara seperti Amerika, karakter rezim di suatu negara sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika. Semakin demokratis suatu negara, semakin tidak mengancam keamanan nasional Amerika.<sup>2</sup> Oleh karena itu, sangat penting bagi Amerika melakukan upaya demokratisasi di negara otoriter dengan membangun penguatan kelembagaan yang demokratis.<sup>3</sup> Ini adalah metode ‘Kuda Troya’ klasik dengan mendukung pembangunan di dalam negara itu sendiri sebelum mereka memulai transisi. Negara-negara maju berarti harus melakukan upaya-upaya persuasif dengan sedikit terselubung, yaitu melakukan pembangunan lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan budaya. Penguatan lembaga-lembaga ini penting sebab, sebagaimana dicontohkan Bremmer dalam kasus Afrika Selatan era Apartheid, lembaga-lembaga ini akan diperlukan ketika negara bersangkutan mau tidak mau merosot ke situasi tidak stabil (hlm. 322). Metode ‘Kuda Troya’ merupakan *social engineering* guna memberikan modal kepada negara-negara tertutup agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri ketika perubahan berlangsung.

Argumentasi Bremmer dalam buku ini sebenarnya hanya melengkapi tentang strategi bagaimana mengakhiri rezim otoriter. Titik berangkat Bremmer sejalan dengan pendapat para sarjana Barat tentang bahaya ‘*illiberal democracy*’ yang mengancam kebebasan sipil dan penegakan hukum.<sup>4</sup> Strategi *capacity building* yang dianjurkan Bremmer mengimplikasikan bahwa Amerika hendaknya mempertimbangkan konteks domestik negara yang ingin ‘dide-mokratiskan’. Amerika harus menjalin kemitraan dengan elite-elite lokal dalam proses pembuatan keputusan daripada memaksakan penerapan model demokrasi Barat secara mentah-mentah. Menganggap negara lain seperti anak kecil yang harus mengikuti kehendak Barat tidak saja me-

micu penolakan, tetapi juga agenda demokratisasi gagal terwujud.<sup>5</sup>

## Relevansinya bagi Indonesia

Pembahasan contoh kasus penerapan teori ‘Kurva J’ dalam buku ini hanya terbatas pada sejumlah negara saja. Lantas, jika mengacu pada kurva tersebut di manakah posisi Indonesia? Ditinjau dari aspek kestabilannya, Indonesia boleh dikatakan masih kurang stabil karena gejolak politik, ekonomi, dan sosial masih sangat sering terjadi. Bahkan kecenderungan pemerintahan masa reformasi adalah melakukan kebijakan yang tidak populis terhadap kebijakan domestik, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, privatisasi pendidikan, maupun kebijakan luar negeri seperti melepas Timor-Timur, membuka hubungan dagang dengan Israel, mendukung sanksi terhadap Iran, lamban dalam membela TKI yang terancam hukuman mati, tidak tegas kepada negara tetangga yang melanggar kedaulatan, memberikan grasi kepada narapidana narkoba, dan lain sebagainya, di mana kesemuanya itu menimbulkan gejolak yang mengancam legitimasi pemerintah. Ditinjau dari aspek keterbukaannya, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara terbuka karena akses informasi dan kebebasan berekspresi dijamin terutama pascareformasi. Jadi, posisi Indonesia dalam Kurva J berada di kanan bawah. Hal ini sangat masuk akal sebab Indonesia masih dalam perjalanan menuju negara terbuka dan stabil di posisi kanan atas Kurva J.

Aspek lain yang menarik adalah keterkaitan antara kebijakan perubahan rezim Amerika dan perubahan politik negara-negara berkembang. Anjuran Bremmer mengenai pentingnya strategi ‘Kuda Troya’ sebelum memulai babak perubahan di negara tertutup mengingatkan kita pada tragedi 1965 di mana banyak pakar menyinyalir keterlibatan Amerika yang sangat kuat. Analisis Peter Dale Scott dan John Roosa menyimpulkan bahwa Amerika berperan secara tidak langsung terhadap aksi kudeta gagal yang berujung pada penghancuran PKI. Hal itu diperkuat dengan pengakuan mantan duta besar Amerika untuk In-

<sup>2</sup> Sean M. Lynn-Jones, “Why the United States Should Spread Democracy”, *Discussion Paper* 98-07, Center for Science and International Affairs, Harvard University, Maret 1998.

<sup>3</sup> Francis Fukuyama, *America at the Crossroads: Democracy, Power, and The Neoconservative Legacy* (New Haven: Yale University Press, 2006), hlm. 114.

<sup>4</sup> Fareed Zakaria, “The Rise of Illiberal Democracy,” *Foreign Affairs*, Vol. 76, No. 6, November–Desember 1997, hlm. 22–43.

<sup>5</sup> Gideon Rose, “Democracy Promotion and American Foreign Policy: A Review Essay”, *International Security*, Vol. 25, No. 3, Winter 2001, hlm. 199.

donesia, Marshal Green yang mengatakan bahwa, “Kami tidak menciptakan gelombang itu, kami hanya menungganginya.”<sup>6</sup> Meskipun Amerika menyangkal keterlibatannya secara langsung dalam tragedi itu, setidaknya Amerika berperan dalam mempersiapkannya, semisal menggagas *civic mission* bagi Angkatan Darat Indonesia serta mendirikan Seskoad yang menurut catatan John Roosa dirancang mencetak para ‘penguasa masa depan’.<sup>7</sup> Strategi ‘Kuda Troya’ Amerika di Indonesia sebelum peristiwa 1965 menunjukkan bahwa perubahan rezim harus dilakukan bukan dengan intervensi militer secara langsung dan kasar seperti di Vietnam, melainkan membangun lembaga yang akan menjadi pilar penyangga ketika perubahan terjadi.

Keterlibatan Amerika dalam proses perubahan rezim di Indonesia juga terjadi pada momen reformasi 1998. Banyak kalangan percaya bahwa tergesurnya Soeharto dari kursi kekuasaan tak terlepas dari faktor politik luar negeri Amerika.<sup>8</sup> Bahkan, jauh sebelum reformasi bergulir, Amerika sudah mempersiapkan ‘liang lahat’ bagi rezim otoriter Soeharto yang dulu pernah didukungnya. Kemunculan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada paruh pertama dekade 1990-an merupakan ‘sumbu politik’ yang memicu ledakan protes masyarakat sipil terhadap pemerintah. Munculnya LSM-LSM dan perannya dalam memperkuat kedudukan masyarakat sipil *vis a vis* pemerintah berutang pada dukungan LSM-LSM internasional yang disokong Barat.<sup>9</sup> Artinya, dukungan Amerika kepada lembaga-lembaga itu, baik secara material maupun nonmaterial merupakan strategi ‘Kuda Troya’ yang memainkan peran cukup krusial dalam membawa perubahan politik di Indonesia. Tentu saja, faktor eksternal itu bukan satu-satunya penyebab demokratisasi, namun faktor penunjang keterbukaan politik di Indonesia.

<sup>6</sup> Tim Weiner, *Legacy of Ashes: The History of The CIA*, (New York: Doubleday, 2007), hlm. 262.

<sup>7</sup> John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm. 263.

<sup>8</sup> Kishore Mahbubani, *Beyond The Age of Innocence: Rebuilding Trust between America and The World* (New York: Public Affairs, 2005), hlm. 44.

<sup>9</sup> Dewi Fortuna Anwar, “The Fall of Suharto: Understanding The Politics of The Global”, dalam Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia at Large: Collected Writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratization*, (Jakarta: The Habibie Center, 2005), hlm. 325.

Terlepas dari bias kepentingan Amerika yang sangat eksplisit, buku ini harus diakui mengandung pelajaran penting bagi bangsa-bangsa yang sedang atau akan menuju demokratisasi. Teori ‘Kurva J’ memberikan papan petunjuk bagi pemerintah mengenai rute yang ditempuh agar sampai pada titik paling kanan kurva sekaligus memberikan papan peringatan di mana dan kapan sebuah negara dapat terperosok ke titik paling bawah kurva. Dalam memberikan saran supaya demokratisasi tidak jatuh ke kerawanan, argumen Bremmer tampak sejalan dengan Jack Snyder tentang pentingnya modal politik, ekonomi, dan sosial sebagai prakondisi demokratisasi. Ada tiga syarat pokok berhasilnya demokratisasi, yaitu kaya dan modern, golongan elite mudah menyesuaikan diri, dan lembaga-lembaga berhaluan liberal yang cukup kokoh dan beragam.<sup>10</sup> Afrika Selatan yang berhasil menghindari dari jebakan ketidakstabilan pasca-perubahan merupakan contoh kasus dari argumen ini.

Salah satu kelebihan lain buku ini adalah Bremmer secara berimbang menganjurkan tindakan-tindakan apa yang harus diambil negara-negara maju untuk mendorong demokratisasi sekaligus mengkritik kebijakan luar negeri yang menekankan pada cara-cara militer. Misalnya dalam kasus invasi ke Irak tahun 2003, ia membuktikan teorinya bahwa demokratisasi yang dipaksakan justru akan menenggelamkan negara bersangkutan ke dalam situasi ketidakstabilan yang tidak berkesudahan. Pelajaran dari Kurva J adalah bahwa sebuah proses penciptaan kesempatan-kesempatan bagi warga Irak untuk mendapatkan keuntungan dari akses sumber daya dari dunia luar akan menyebabkan rezim Saddam tidak stabil sehingga hal itu akan sedikit lebih baik bagi rakyat Irak ataupun Amerika (hlm. 104).

Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa buku ini tak luput dari kekeliruan yang cukup fatal. Sebagai contoh adalah proyeksi Bremmer mengenai masa depan politik Suriah. Bremmer mengatakan bahwa sebagai negara yang cukup stabil, Suriah merupakan salah satu negara yang memang rentan terhadap tantangan-tantangan jangka panjang akibat lembaga politiknya yang

<sup>10</sup> Jack Snyder, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm. 366.

belum matang, tetapi tidak akan mengalami kekacauan nyata tahun ini atau tahun depan (hlm. 15). Prediksi Bremmer meleset karena ternyata Suriah terkena imbas *Arab Spring* yang memicu perang saudara tak berkesudahan hingga saat ini. Kekurangan lain adalah argumen bahwa perjalanan suatu negara menuju kanan kurva adalah suatu proses yang alami (hlm. 25). Teori ini tidak berlaku untuk Indonesia pada masa Orde Baru karena masyarakat lebih mendambakan kestabilan daripada keterbukaan. Pada masa Orde Baru, rakyat jelata tidak terlalu menghiraukan kebijakan represif pemerintah selama kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi. Bagi negara yang jumlah kelas menengahnya relatif kecil, kebebasan sipil tampaknya tidak lebih berharga ketimbang tercukupinya kebutuhan dasar mereka. Bahkan di negara-negara yang relatif makmur sekalipun, misalnya Cina dan Arab Saudi, meningkatnya standar hidup masyarakat tidak secara otomatis memicu tuntutan terhadap kebebasan sipil. Satu lagi, argumen Bremmer tampak tidak sejalan dengan fakta bahwa di Arab Saudi, Amerika tidak peduli dengan masa depan rezim di negara otoriter tersebut kecuali kepentingan geopolitik dan geostrategis.

Akhirnya, tesis buku ini sangat konsisten dengan tesis teori perdamaian demokratis yang berasumsi bahwa semakin demokratis sebuah negara semakin tidak agresif negara tersebut. Alhasil, demokrasi bisa berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Corak pemikiran liberal begitu kuat sehingga agenda besar negara-negara maju adalah menggiring negara-negara tertutup menuju keterbukaan. Hanya pemerintahan yang stabil tetapi memberikan kebebasan kepada warga negaranya yang bisa diandalkan untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan makmur.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anwar, Dewi Fortuna. 2005. "The Fall of Suharto: Understanding The Politics of The Global", dalam Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia at Large: Collected Writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratisation*. Jakarta: The Habibie Center.
- Fukuyama, Francis. 2006. *America at the Crossroads: Democracy, Power, and The Neoconservative Legacy*. New Haven: Yale University Press.
- Mahbubani, Kishore. 2005. *Beyond The Age of Innocence: Rebuilding Trust between America and The World*. New York: Public Affairs.
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Snyder, Jack. 2003. *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Weiner, Tim. 2007. *Legacy of Ashes: The History of The CIA*. New York: Doubleday.

### Jurnal

- Lynn-Jones, Sean M. 1998. "Why the United States Should Spread Democracy", *Discussion Paper 98-07*. Center for Science and International Affairs, Harvard University, March.
- Mansfield, Edward & Jack Snyder. 1995. "Democratization and The Danger of War", *International Security*, Summer, 20, (1): 5
- Rose, Gideon. 2001. "Democracy Promotion and American Foreign Policy: A Review Essay", *International Security*, Winter, 25 (3): 199.
- Zakaria, Fareed. 1997. "The Rise of Illiberal Democracy". *Foreign Affairs*, November-December, 76 (6): 22-43.